

IMPLEMENTASI KONSEP TRIPPLE HELIX DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN GARUT

Hani Siti Hanifah¹, Marissa Disthy Putri², Nurbudiwati³,
Ade Purnawan⁴, Dwirani Fauzi Lestari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Garut

¹email: hanisiti1965@uniga.ac.id

²email: marissa@uniga.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the triple helix concept and institutional governance towards the development of tourism villages in Garut Regency. Currently, there are 132 pioneering tourism villages spread across 42 sub-districts, where pioneering tourism villages are villages that have just started operating and are still in a limited scope. The construction and development of tourism villages are very important to improve the community's economy. The development of tourism villages through collaboration between the government, private sector, and universities, as well as institutional governance, is expected to develop tourism villages. The research method uses a qualitative approach through purposive sampling and triangulation techniques in pioneering tourism villages. Primary data from structured interviews with informants and secondary data from literature, journals, and relevant websites. The results of the study show the collaboration of universities as organizers, government institutions as regulators and financial supporters, and private companies as technical supporters in the fields of production and marketing. The implementation of the triple helix in community service activities organized by lecturers at universities and companies can take the initiative to carry out mutually beneficial cooperation without waiting for initiatives from universities or government programs, and bureaucratic processes in the government should be made easier, simpler, and based on information technology so that they can adapt to changes that occur in the field without reducing the achievement of goals.

Keywords: Triple Helix, Governance, Tourism Village Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi konsep triple helix dan tata kelola kelembagaan terhadap pengembangan desa wisata di Kabupaten Garut. Saat ini terdapat 132 desa wisata rintisan yang tersebar di 42 kecamatan dimana desa wisata rintisan adalah desa yang baru mulai beroperasi dan masih dalam lingkup terbatas. Pembangunan dan pengembangan desa wisata sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan Desa wisata melalui kolaborasi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta tata kelola kelembagaan diharapkan dapat mengembangkan Desa wisata. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui purposive sampling dan teknik triangulasi pada desa wisata rintisan. Data primer dari wawancara terstruktur pada informan dan data sekunder dari literatur, jurnal serta situs yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi perguruan tinggi sebagai penyelenggara, lembaga pemerintah sebagai regulator dan pendukung keuangan, serta perusahaan swasta sebagai pendukung teknis bidang produksi dan pemasaran. Implementasi triple helix pada kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan dosen di perguruan tinggi dan perusahaan dapat mengambil inisiatif melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan tanpa menunggu inisiatif dari perguruan tinggi atau program pemerintah serta proses birokrasi di pemerintah hendaknya dipermudah, disederhanakan, dan berbasis teknologi informasi sehingga dapat beradaptasi perubahan yang terjadi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian tujuan.

Kata kunci: Triple Helix, Tata Kelola, Pengembangan Desa Wisata

1. Pendahuluan

Salah satu daerah di Jawa Barat yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun manca negara adalah Kabupaten Garut yang dikenal sebagai *Swiss Van Java* dari potensi destinasi wisata (Rahmat, M. R. A., Novianti, E., & Yustikasari, 2022) melalui destinasi desa wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya sebagai destinasi wisata berbasis desa (Marham Jupri Hadi et al., 2022). Tahun 2024 Badan Pusat Statistik Jawa barat mencatat jumlah pengunjung mancanegara sebanyak 951 orang dengan jumlah wisatawan domestik 75.878.249 orang, hal tersebut masih jauh dari target pemerintah setempat yakni pada angka 85 juta pengunjung domestik di Jawa Barat (BPS, 2024). Desa Wisata adalah pengembangan kawasan pedesaan menampilkan adat istiadat dan budaya, seperti atraksi, akomodasi serta pendukung lainnya (Mumtaz, A. T., & Karmilah, 2021).

Kabupaten Garut memiliki potensi desa wisata untuk dapat dikembangkan sebagai sektor wisata yang berkelanjutan dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Khairunnisa, 2020). Desa wisata adalah pengembangan kawasan pedesaan menampilkan adat istiadat dan budaya, seperti atraksi, akomodasi serta pendukung lainnya (Mumtaz, A. T., & Karmilah, 2021) yang dapat menjadi peluang terserapnya tenaga kerja dari tumbuhnya hotel dan restoran serta fasilitas pendukung lainnya (Wahyu, Y. F., & Triani, 2023). Kabupaten Garut memiliki 132 desa wisata rintisan yang tersebar di 42 kecamatan dimana desa wisata rintisan adalah desa yang baru mulai beroperasi dan masih dalam lingkup terbatas.

Desa wisata rintisan memiliki potensi wisata yang besar, tetapi belum dikunjungi wisatawan dan sarana prasarana yang terbatas (Jabarprov, 2024). Selanjutnya beberapa permasalahan pada desa wisata rintisan di Kabupaten Garut antara lain 1) kurangnya kesadaran

masyarakat akan potensi desa wisata dan manfaatnya, 2) kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung desa wisata masih terbatas, 3) kurangnya inovasi dan rentan duplikasi atraksi wisata, 4) kurangnya keterampilan pelaku wisata khususnya anggota pokdarwis, 5) kurangnya perencanaan matang dan kolaborasi yang terbatas, 6) kurangnya dukungan pemerintah baik dalam hal pendanaan, pemeliharaan dan pengembangan, 7) kurangnya promosi desa wisata, 8) kurangnya infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi dan akses internet (DPMD Kabupaten Garut, 2024).

Untuk mengembangkan Desa Wisata mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan memerlukan inovasi dan aksesibilitas termasuk di wilayah kabupaten Garut perlu upaya kolaboratif, bersinergi dalam mengelola Desa Wisata (Wibowo et al., 2022). Adapun pengembangan desa wisata (Hadiwijoyo, 2017) merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menarik wisatawan, dimana dalam kegiatan dan usaha tersebut dilakukan pula usaha untuk menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Upaya promosi produk wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut masih kurang optimal oleh karena belum sepenuhnya di dukung oleh akomodasi, sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya sosialisasi kepada pengusaha dan perguruan tinggi belum ideal menerima informasi terkait dengan pariwisata di Kabupaten Garut (Kania et al., 2023).

Umumnya pengelolaan Desa Wisata belum optimal oleh karena kekurangfahaman konsep Desa Wisata (Hasanah, 2019b) yang menyebabkan peluang-peluang produktif digunakan oleh pihak luar desa yang memiliki strategi yang tepat. Untuk mengembangkan Desa Wisata mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan

memerlukan inovasi dan aksesibilitas termasuk di wilayah kabupaten Garut perlu upaya kolaboratif, bersinergi dalam mengelola Desa Wisata (Wibowo et al., 2022). Salah satu sektor yang potensial untuk bersinergi melalui lembaga BUMDes yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha wisata. Sementara itu keberhasilan proses implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata pada umumnya masih belum optimal karena rendahnya sumber daya manusia yang kompeten (Maulidiah & Megawati, 2022) terutama dalam pertanggungjawaban keuangan (Anggraeni, W. A., Ningsih, W., Romdhon, M., & Wahyuningsih, 2024).

Dalam aspek pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel dan adanya keterbukaan informasi penggunaannya serta mudah diakses oleh masyarakat (Ningsih W, 2023 C.E.). BUMDes bertumbuh secara kuantitas, tetapi tidak diiringi dengan pertumbuhan secara kualitas Sehingga belum mendukung kesejahteraan dan pembangunan desa (Fienaurisilmi, 2023). Adapun jumlah BUMDes saat ini di Kabupaten Garut terdapat 421 BUMDes yang telah mempunyai Badan Hukum dengan 186 BUMDes tidak berjalan dan 10 BUMDes dengan status Maju. Jumlah BUMDes bertumbuh secara kuantitas, tetapi tidak diiringi dengan pertumbuhan secara kualitas, belum mampu berkembang sesuai tujuan utamanya yaitu menumbuhkan perekonomian di desa sehingga mampumendukung kesejahteraan dan pembangunan desa (Hanifah, H. S., Harahap, E. F., Marlina, S., & Septiana, 2025). Tata kelola kelembagaan (Mardiasmo, 2018) adalah adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan unsur- unsur manajemen, efisiensi dan efektivitas, partisipasi masyarakat, Pertanggungjawaban, *Responsiveness* dari

lembaga terkait, kerangka hukum serta *frame work* yang nyata atau konseptual.

Dalam (JAHID, 2019) menjelaskan bahwa perkembangan konsep sinergitas dalam pembangunan pariwisata dimulai dengan gagasan Triple Helix yang diadopsi dari teori Etzkowitz (Etzkowitz, 2008) dengan mengembangkan model Triple Helix yang mengadopsi model inovasispiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (pemerintah, swasta, dan akademis). Pendekatan Triple Helix ditandai oleh (1) peran kunci universitas sebagai produsen pengetahuan utama; (2) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di pasaran; (3) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan (Arnkil, R., Jarvensivu, A., Koski, P., Piirainen, 2010). Konsep Triple Helix dalam pariwisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang melibatkan tiga aktor penting dalam pengembangan yang akan dilakukan, aktor penting tersebut yaitu pemerintah, akademisi, dan industri swasta seperti akademisi berperan memetakan permasalahan dan potensi pengembangan desa, pemerintah berperan melakukan promosi, dan industri berperan dalam mendistribusikan produk (Pratiwi, S. B., Djaelani, A. K., & Wahono, 2020).

Perkembangan pendekatan triple helix menghasilkan beberapa konfigurasi (Rufaidah et al., 2015), yaitu pada Konfigurasi Pertama statist regime dimana pemerintah memainkan peran sebagai pengarah yang mendorong akademisi dan industri; Konfigurasi kedua, disebut *laissez-faire regime*, dimana industri adalah kekuatan pendorong dengan dua pihak lainnya sebagai struktur pendukung pelengkap (*ancillary support structure*);

Konfigurasi ketiga, disebut sebagai balance model yaitu melibatkan peran ketiga pihak sehingga tercipta masyarakat berbasis pengetahuan; universitas dan institusi lainnya memerankan peran aktif dalam kemitraan dengan industri dan pemerintah, bahkan dalam pembentukan inisiatif bersama (joint initiatives). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti dengan mengkaji desa wisata pada aspek tata kelola kelembagaan diantaranya (Hanifah, H. S., Harahap, E. F., Marlina, S., & Septiana, 2025), (Kartika Yuni, H., Ardani, N. N., Bili, M. Y., & Kurnia, 2023) dan (Wibowo et al., 2022), namun belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pengembangan Desa Wisata dengan konsep triple helix. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan aspek konsep triple helix dan Tata Kelola Kelembagaan untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep triple helix dan tata kelola kelembagaan terhadap pengembangan desa wisata Kabupaten Garut untuk menjadi masukan dan perbaikan dalam kebijakan daerah dan stakeholder di Kabupaten Garut.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian literatur utama variabel penelitian adalah ilmu ekonomi pembangunan yang merupakan bidang ekonomi dengan pembahasan pembangunan ekonomi negara berkembang, solusi serta upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi (Siti Hanifah, Hani. Muharam, Husni. Kartiko, 2020) dengan teori pendukung variabel penelitian, tata kelola kelembagaan (Mardiasmo, 2018) adalah adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan unsur- unsur manajemen, efisiensi dan efektivitas, partisipasi masyarakat, Pertanggungjawaban, Responsiveness dari

lembaga terkait, kerangka hukum serta frame work yang nyata atau konseptual.

Konsep Triple Helix (Etzkowitz, H. & Leydesdorff, 1995) adalah model kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Interaksi dan sinergi di antara ketiga aktor ini, yang meliputi pembentukan jaringan, kolaborasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia dengan dimensi utama meliputi interaksi antar tiga aktor ini, sedangkan indikatornya mengukur keberhasilan kolaborasi, seperti peningkatan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun pengembangan desa wisata (Hadiwijoyo, 2017) merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menarik wisatawan, dimana dalam kegiatan dan usaha tersebut dilakukan pula usaha untuk menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung.

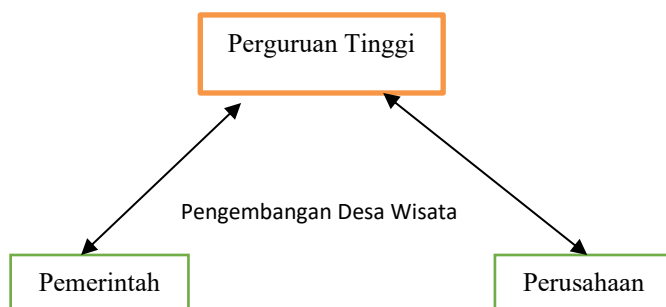
Selain itu, penelitian ini menambahkan dukungan pemerintah melalui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di Kabupaten Garut sebagai variabel penting dalam pengembangan desa wisata sehingga memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya, yang sebagian besar hanya berfokus pada tata kelola kelembagaan (Ilmi, L., & Prayoga, T. (2024). Ilmi, L., & Prayoga, 2024)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi aktual implementasi konsep triple helix dan tata kelola kelembagaan terhadap pengembangan desa wisata di Kabupaten Garut. Lokasi penelitian mencakup desa wisata dengan katagori maju yang tersebar di berbagai kecamatan, yang dipilih secara purposive.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, dan aparatur dinas terkait, serta pihak perguruan tinggi yang terkait dengan penelitian.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tiga variabel utama, triple helix dan tata kelola kelembagaan dan pengembangan desa wisata. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 1
Model Implementasi Triple Helix

4. Hasil Dan Pembahasan

Pengembangan Desa Wisata merupakan salah satu strategi untuk memanfaatkan potensi kawasan pedesaan dengan menggabungkan kekayaan budaya, tradisi, dan keindahan alam menjadi daya tarik wisata yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Mumtaz, A. T., & Karmilah, 2021), Desa Wisata bukan hanya tempat untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga untuk menggali pengalaman budaya yang otentik, termasuk atraksi wisata, akomodasi, serta berbagai fasilitas

pendukung yang menyertai kegiatan wisata. Dalam konteks Kabupaten Garut, pada tahun 2023, BPS mencatat adanya 3.874.676 kunjungan wisatawan dengan target mencapai 4 juta orang, menunjukkan adanya potensi besar dalam sektor pariwisata. Namun, meskipun terdapat 47 Desa Wisata, hanya beberapa desa yang menunjukkan perkembangan yang signifikan, seperti Saung Ciburiat Samarang dan Situ Cangkuang Leles. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang perlu mendapat perhatian lebih.

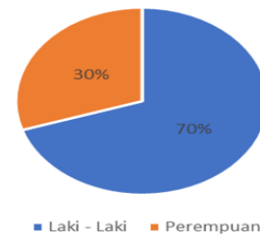
Masalah utama dalam pengelolaan Desa Wisata di Garut terletak pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep Desa Wisata itu sendiri (Hasanah, 2019a). Banyak desa yang seharusnya memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal malah diserahkan kepada pihak luar desa yang lebih memahami strategi pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Padahal, seharusnya desa-desa ini bisa berkembang dengan lebih mandiri dan berkelanjutan jika dilengkapi dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai desa wisata yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan inovatif dalam mengelola produk wisata serta memperbaiki aksesibilitas ke lokasi wisata, yang tentunya harus didukung oleh kerjasama antar berbagai pihak baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha (Wibowo et al., 2022). Adapun karakteristik Desa Wisata di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Kategori Rintisan: Desa wisata pada kategori ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan pengenalan potensi. Meskipun memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang dapat dikembangkan, pengelolaan dan infrastruktur wisata masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisata belum

- memadai, dan desa ini baru dikenal oleh pengunjung yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga lainnya. Dalam tahap ini, desa wisata masih bergantung pada penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan destinasi wisata. Pengelolaan desa wisata pada kategori ini masih bersifat lokal, dan belum memiliki sistem yang lebih terstruktur.
2. Kategori Pengembangan (Berkembang): Pada kategori ini, desa wisata sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang positif. Desa sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik dari dalam daerah maupun luar daerah, yang mulai berkunjung. Sarana dan prasarana pendukung wisata, seperti akses jalan, fasilitas akomodasi, dan tempat wisata, sudah mulai dikembangkan dengan lebih baik. Infrastruktur yang ada berfungsi untuk mendukung kenyamanan pengunjung, meskipun masih dalam tahap peningkatan. Desa ini mulai menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lokal, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi setempat. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata semakin meningkat, dan mereka mulai terlibat lebih aktif dalam kegiatan wisata. Meskipun demikian, desa ini masih memerlukan dukungan lebih lanjut agar dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dan daya tariknya bagi wisatawan.
 3. Kategori Maju: Desa wisata yang telah mencapai kategori ini telah berhasil menjadi destinasi wisata yang terkenal, dengan pengunjung yang tidak hanya datang dari daerah setempat, tetapi juga dari luar daerah dan mancanegara. Masyarakat di desa ini sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata yang ada dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaannya. Desa ini telah memiliki fasilitas wisata yang lengkap dan memadai, yang mampu menarik minat wisatawan. Infrastruktur pendukung pariwisata, seperti penginapan, transportasi, dan fasilitas umum, telah dikembangkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Masyarakat lokal telah memiliki kapasitas untuk mengelola usaha pariwisata secara mandiri melalui kelompok kerja lokal atau prodarwis, dan mereka telah mulai memanfaatkan Dana Desa dengan efektif untuk pengembangan lebih lanjut. Sistem pengelolaan desa wisata sudah cukup terstruktur dan memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi lokal serta pendapatan asli desa.
 4. Kategori Mandiri: Desa wisata yang berada pada kategori mandiri telah mencapai tahap pengelolaan yang sangat matang. Masyarakat desa tidak hanya berinovasi dalam mengembangkan potensi wisata, tetapi juga berhasil menciptakan berbagai produk wisata yang unik dan beragam, yang mampu menarik wisatawan lokal maupun internasional. Diversifikasi produk wisata yang mereka tawarkan telah menciptakan unit kewirausahaan yang mandiri, yang tidak lagi bergantung pada pendanaan eksternal. Desa ini sudah menjadi destinasi wisata yang diakui secara internasional, dan telah menerapkan prinsip keberlanjutan yang diakui oleh dunia, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana di desa ini sudah memenuhi standar internasional, minimal ASEAN, untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pengelolaan desa wisata dilakukan secara kolaboratif antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat lokal, dan

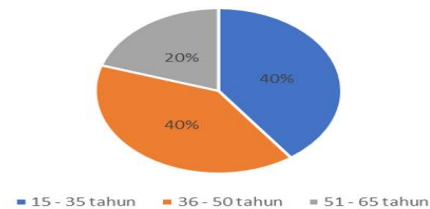
sektor swasta, yang membentuk sinergi dalam mengelola dan memajukan desa wisata. Digitalisasi telah dimanfaatkan dengan optimal untuk mempromosikan dan menjual produk wisata secara mandiri melalui platform digital, sehingga desa ini dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Pada kategori mandiri, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menguntungkan, tetapi juga menjadi model bagi desa lain dalam pengelolaan dan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan yang diterapkan di desa wisata mandiri mencakup pelestarian alam, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengelolaan yang transparan, yang dapat menjadi contoh bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Garut. Inovasi dalam produk wisata dan pemanfaatan teknologi digital semakin meningkatkan daya saing desa wisata di pasar global, menjadikannya sebagai destinasi pilihan yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional (DPMD Garut, 2025).

Dengan demikian, pengembangan desa wisata di Kabupaten Garut, yang mulai dari tahap rintisan hingga mandiri, menunjukkan potensi yang sangat besar. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan desa wisata, agar dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui perencanaan dan dukungan yang tepat, Kabupaten Garut berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang menarik wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam serta kekayaan budaya lokal. Adapun karakteristik informan dalam penelitian terlihat pada diagram gambar di bawah ini :



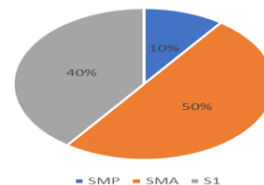
Gambar 2
Karakteristik Informan Jenis Menurut Kelamin Informan

Gambar 2 terlihat jenis informan mayoritas adalah laki-laki, hal ini karena pada umumnya pengelolaan desa wisata lebih membutuhkan kemampuan laki-laki.



Gambar 3 Karakteristik Informan Jenis Menurut Usia

Pada gambar 3 terlihat bahwa jenis informan mayoritas ada pada rentang usia 15-35 yaitu usia produktif.



Gambar 4
Karakteristik Informan Jenis Menurut Tingkat Pendidikan

Pada gambar 4 terlihat bahwa jenis informan mayoritas memiliki tingkat pendidikan SMA, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat umumnya.

1 Tabel
Implementasi Konsep Triple Helix
Terhadap Pengembangan Desa Wisata Di
Kabupaten Garut.

	Tujuan	Peran	Kekua tan	Kelem ahan
Pe mer inta h	Berkepe ntingan menamb ah jumlah wirausa ha baru untuk membuk a lapanga n kerja dan mengura ngi pengang guran	Pembina Inkubasi usaha Melakuk an koordinasi dengan stakehol ders Member ikan bantuan alat dan bahan produksi usaha Memoni tor dan pelaksa naan kegiatan	Mempu nyai kewena ngan dan otoritas untuk membu at model inkubasi usaha Memili ki anggar an Memili ki cakupa n wilaya h pelaksa naan progra m yang luar	Birokra si yang panjang berpote nsi mengha mbat efektivi tas kegiata n. Bekerja berdasa rkan ketaata n pada aturan sehingg a kurang fleksibe l pada perubah an.
Sw a sta	Wirausa ha baru dapat dijadika n mitra bisnis, seperti konsum en bahan baku dan supply produk	Pelatih, motivato r, dan pendam ping peserta inkubasi usaha Pembuk a jalan bisnis bagi peserta usaha	Memili ki pengeta huan dan keahlia n di bidang usaha Memili ki jaringa n dan pengala man usaha	Berorie ntasi pada mencari keuntun gan dan aktivita s sosial perlu inisiatif oleh pemer intah atau perguru an tinggi
Per gur uan Tin ggi	Melaksa nakan kewajib an dosen pengabd ian masyara kat dan melakuk an	Perenca naan, Pelaksa naan dan evaluasi. Penyele nggara kegiatan inkubasi	Mampu berkom unikasi dengan pemer intah dan perusah aan swasta	Belum optimal dalam anggara n untuk kegiata n

kajian akademi s.	usaha. Inisiator antara pemerint ah dan perusaha an swasta	Berada ptasi dengan peratur an dan peruba han	Belum optimal dalam pengeta huan dan keteram pilan bidang usaha yang dikemb angan.
-------------------------	---	---	--

Sumber Survey dan Wawancara, 2025

Pada Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa (1) tujuan aktor berbeda; (2) memerlukan standar penyelenggaraan, biaya penyelenggaraan, pengelola kegiatan yang handal dan ahli berpengalaman yang mampu memotivasi tujuan; (3) setiap aktor mempunyai kekuatan dan kelemahan. Namun ketiga aktor kepentingannya terintegrasi, berkolaborasi memainkan perannya masing-masing untuk melengkapi kekuatan dan kelemahan. Konsep triple helix memainkan peran secara terintegrasi dan saling melengkapi untuk menyelesaikan tujuan tertentu (Kaukonen, E., & Nieminen, 2000), (Rufaidah, P., Padjadjaran, U., & Rufaidah, 2015) dan (Vaivode, 2015).

Tabel 2 Tata kelola Kelembagaan Desa
Wisata Kabupaten Garut

	Desa Wisata Rintisan	Desa Wisata Pengembangan
Tata kelola	fokus pada pengembangan potensi desa wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Fokus pada kepengurusan Pedagang (Para pelaku UMKM)
Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	Pengembangan UMKM

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program, dan evaluasi	Berjalan cukup baik	Berperan aktif selalu dalam musyawarah
Pertanggungjawaban kepada lembaga public	Sudah cukup akuntabel dan transparan	Sudah cukup akuntabel dan transparan
Cepat dan tanggap mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan unit usaha yang berkaitan dengan desa wisata	Ya Warga Desa merupakan prioritas utama	Ya Warga Desa prioritas
Sesuai kerangka hukum	Sudah Sesuai	Sudah
Keterbukaan terhadap masukan, jujur, serta mengutamakan berbagi informasi	Relatif Terbuka	Terbuka dan selalu menerima masukan
Memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan dan kesejahteraan	Ya	Ya
Transparansi dalam mengolah usaha desa wisata	Ya	Ya
Melakukan pengembangan usaha pada desa wisata	belum melakukan pengembangan usaha	belum optimal
Memiliki visi dan misi bersama masyarakat	Ya	Ya

Tabel 3 Tata kelola Kelembagaan Desa Wisata Kabupaten Garut

	Desa Wisata Maju		Desa wisata Mandiri
Tata kelola	Fokus promosi	pada	Melalui singkronisasi yang baik.
Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa	Branding media sosial	pada	Warga setempat bekerja di wisata.
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan program, dan evaluasi	Berperan aktif Terlibat dalam setiap Musyawarah Mufakat		Berperan aktif Terlibat dalam setiap Musyawarah Mufakat
Pertanggungjawaban kepada lembaga public	Sudah cukup akuntabel dan transparan		Sudah cukup akuntabel dan transparan
Cepat dan tanggap mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan unit usaha yang berkaitan dengan desa wisata	Ya, diutamakan warga desa		Ya, diutamakan warga desa
Sesuai kerangka hukum	Sudah		Sudah
Keterbukaan terhadap masukan, jujur, serta mengutamakan berbagi informasi	Relatif Terbuka		Sangat terbuka
Memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan dan kesejahteraan	Ya		Ya
Transparansi dalam mengolah	Cukup Transparan		Sangat transparan

usaha desa wisata		
Melakukan pengembangan usaha pada desa wisata	Sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan	Sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan
Memiliki visi dan misi bersama masyarakat	Ya	Ya

Sumber Survey dan Wawancara, 2025

Pada tabel 2 dan 3 diatas menggambarkan bahwa pada umumnya tata kelola kelembagaan pada Desa wisata sudah berjalan di Kabupaten Garut meskipun ada yang masih memerlukan pembenahan sejalan dengan penelitian (Munib, A., Sukmana, O., & Soedarwo, 2024).

Tabel 4
Kendala - Kendala Tata Kelola Kelembagaan Pada Desa Wisata

Aspek Manajemen	Aspek Pembinaan	Aspek Sarana dan prasarana
Manajemen Perencanaan SDM pemahaman <i>good governance</i> , Modal terbatas, Pemasaran & Pengembangan belum beradaptasi dengan perubahan pasar. konflik kepentingan,	Belum adanya pembinaan khusus	Sarana dan Prasana belum lengkap. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh

Tabel 5
Kendala - Kendala Tata Kelola Kelembagaan Pada Desa Wisata

Aspek Manajemen	Aspek Kerjasama	Aspek Kesadaran Masyarakat	Aspek Pengembangan
Manajemen Perencanaan SDM pemahaman <i>good governance</i> , Modal terbatas, Pemasaran & Pengembangan belum	Kurangny a bekerja sama antar desa wista	Sarana dan Prasana belum lengkap. Kesadaran masyarakat terhadap potensi	Pengembangan tidak tercover

beradaptasi dengan perubahan pasar. konflik kepentingan,	wisata belum tumbuh
--	---------------------

Pada tabel 5 dan 6 pada umumnya kendala tata kelola kelembagaan desa wisata terletak pada sarana dan prasana belum lengkap dan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh hal ini sejalan dengan penelitian (Suherman, D., Herdiana, H., Fikri, L. A., ... & Agustina, 2024). Adapun pada umumnya kendala pengembangan desa wisata terletak pada SDM, Sarana dan prasarana serta promosi sejalan dengan penelitian (Priyanto, P., & Rizkiawan, 2023).

5. Kesimpulan

Koraborasi perguruan tinggi sebagai penyelenggara, lembaga pemerintah sebagai regulator dan pendukung keuangan, serta perusahaan swasta sebagai pendukung teknis bidang produksi dan pemasaran. Implementasi triple helix pada kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan dosen di perguruan tinggi dan perusahaan dapat mengambil inisitif melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan tanpa menunggu inisiatif dari perguruan tinggi atau program pemerintah serta proses birokrasi di pemerintah hendaknya dipermudah, disederhanakan, dan berbasis teknologi informasi sehingga dapat beradaptasi perubahan yang terjadi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, W. A., Ningsih, W., Romdhon, M., & Wahyuningsih, W. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Garut. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10579-10587.

- Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., Piirainen, T. (2010). Exploring Quadruple Helix Outlining User-Oriented Innovation Models. *Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., & Piirainen, T. (2010). Exploring the Quadruple Helix. Report of Quadruple Helix Research for the CLIQ Project. Tampere: Work Research Centre, University of Tampere.*
- Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix--University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. *EASST Review*, 14(1), 14-19.
- Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix, University-Industry-Government Innovation in Action. *Routledge. New York (US).*
- Fienaurisilmi, M. H. S. (2023). Efektivitas BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Garut. *LAN Commentaries LPC-015-ID. Puslitbang PKASN.*
- Hadiwijoyo, S. S. (2017). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanifah, H. S., Harahap, E. F., Marlina, S., & Septiana, Y. (2025). Pengembangan Desa Wisata Melalui Digital Marketing, Inovasi Produk dan Tata Kelola Kelembagaan BUMDes di Kabupaten Garut. *Jurnal Algoritma*, 22(1), 982-992.
- Hasanah. (2019a). Tata kelola desa wisata Sukaratu berbasis kerakyatan. *Sawala J Adm Negara*, 7(2), 108-121.
- Hasanah, B. (2019b). Tata kelola desa wisata Sukaratu berbasis kerakyatan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 108-121.
- Ilmi, L., & Prayoga, T. (2024). Ilmi, L., & Prayoga, T. (2024). Kelembagaan Desa Wisata Claket, Pacet Mojokerto. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 168-174.
- JAHID, J. (2019). Destinasi Wisata: Butuh Sinergi dan Peran Penta Helix. *Fajar Newspaper*, 2019.
- Kania, I., Rustiana, E., & Nugrahawati, H. (2023). Efektivitas Promosi Produk Wisata Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 10–22. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i1.133>
- Kartika Yuni, H., Ardani, N. N., Bili, M. Y., & Kurnia, T. I. (2023). Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 9(1), 16–25. <https://doi.org/10.31940/Bp.V9i1.16-25>.
- Kaukonen, E., & Nieminen, M. (2000). Modeling the triple helix from a small country perspective: the case of Finland. *The Journal of Technology Transfer*, 24(2–3), 173– 183. <https://doi.org/10.1023/A:1007851321496>.
- Khairunnisa, A. (2020). Implementasi pariwisata berkelanjutan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat perspektif Islam: Studi Di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *(Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).*
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Marham Jupri Hadi, Lume, & Meiyanti Widyaningrum. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang Dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten Lombok Timur. *Journal*

- Of Tourism And Economic*, 5(1), 32–45.
<https://doi.org/10.36594/jtec/01a88690>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Publika*, 10(2), 391–406.
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). Digitalisasi wisata di desa wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1).
- Munib, A., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). Memajukan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan BUMDES: Pendampingan Desa Wisata Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. *Madaniya*, 5(3), 1228-1237. <https://doi.org/10.53696/27214834.893>.
- Ningsih W, A. (203 C.E.). Ningsih W, Anggraeni. Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Pemediiasi. *J Akunt Manad*. 2023;4(3):602–19.
- Pratiwi, S. B., Djaelani, A. K., & Wahono, B. (2020). Implementasi Triple Helix Dalam Mendorong Pertumbuhan Desa Wisata Pertanian Organik Desa Kanigoro Sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Pekerjaan (Studi Pada Desa Wisata Pertanian Organik Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(19).
- Priyanto, P., & Rizkiawan, R. (2023). Pengembangan Potensi Desa Sebagai Destinasi Wisata Budaya Tinjauan Terhadap Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies*, 1(2), 8.
- Rahmat, M. R. A., Novianti, E., & Yustikasari, Y. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Sindangkasih Di Kabupaten Garut. *Media Bina Ilmiah*, 17(4), 669-678.
- Rufaidah, P., Padjadjaran, U., & Rufaidah, P. (2015). Branding Strategy Berbasis Ekonomi Kreatif: Triple Helix vs . Quadruple Helix Branding Strategy Berbasis Ekonomi Kreatif: Triple Helix vs . Quadruple Helix. *Researchgate*, (July). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4132.7208>.
- Siti Hanifah, Hani. Muharam, Husni. Kartiko, E. (2020). *Ekonomi Pembangunan*. Universitas Garut.
- Suherman, D., Herdiana, H., Fikri, L. A., ... & Agustina, S. D. (2024). Pelatihan Pemandu Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Sutoman (Sustainable Tourism Mandalagiri) Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(1), 339-348.
- Vaivode, I. (2015). Triple Helix Model of University–Industry–Government Cooperation in the Context of Uncertainties. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 1063–1067. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.526>.
- Wahyu, Y. F., & Triani, M. (2023). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 9 Destinasi Wisata Favorit Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 19-28.
- Wibowo, B., Suherlan, H., Hidayah, N., & Nurrochman, M. (2022). Analisis Tata Kelola Kolaboratif Desa Wisata yang Mandiri dan Berkelanjutan: Investigasi Empiris dari Ngargoretno-Magelang. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(1), 75–84. <https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.646>